



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang : 2021/2022
Masa Persidangan : V
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat kerja
Sifat Rapat : Tertutup
Hari/Tanggal : Kamis, 9 Juni 2022
Waktu : 10.00 WIB s.d 12.00 WIB
Ketua Rapat : Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H, M.Hum
Sekretaris Rapat : Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat
Komisi III DPR RI
Acara : Pembahasan RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun
2023, Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Hadir : **A. Anggota Komisi III:
39 dari 53 Anggota Komisi III**

PIMPINAN : 4 dari 5 Pimpinan

1. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A (Ketua/ F-PDIP)
2. Dr.Ir.H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (Wakil
Ketua/ F-PG)
3. H. Desmond Junaidi Mahaesa, S.H., M.H.
(Wakil Ketua/ F-Partai Gerindra)
4. Ir. Pangeran Khairul Saleh. M.M. (Wakil Ketua
/F-PAN)

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN: 9 Anggota dari 11 Anggota:**

1. Ichsan Soelistio
2. Trimedya Panjaitan,S.H.,M.H.
3. Drs. Nurdin, M.M.
4. Gilang Dhielafararez, S.H., L.L.M.
5. H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
6. Johan Budi Sapto Pribowo
7. I Wayan Sudirta, S.H.
8. H. Agustiar Sabran, S.Kom.
9. Irjen Pol (Purn) Drs.H. Safaruddin

FRAKSI PARTAI GOLKAR:

4 Anggota dari 7 Anggota:

1. Hj. Adde Rossi Khoerunnissa, S. Sos., M.Si.
2. Drs. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H.
3. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
4. Supriansa, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GERINDRA:

4 Anggota dari 7 Anggota:

1. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M. Hum.
2. Siti Nurizka Jaya, S.H., M.H.
3. Bimantoro Wiyono, S.H.
4. Drs. H. Syaiful Rasyid, M.M

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1 Anggota dari 5 Anggota:

1. Y. Jacky Uli

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

5 Anggota dari 5 anggota:

1. H. Moh. Rano Al Fath, S.H., M.H.
2. H. Jazilul Fawaid, SQ., M.A.
3. H. Cucun Ahmad Syamsurijal.,M.A.P
4. N.M. Dipo Nusantara Pua Upa.,S.H., M.Kn.
5. Heru Widodo, S.Psi

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 Anggota dari 5 Anggota:

1. Dr. Hince I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., Accs.
2. H. Santoso, S.H., M.H.
3. H. Agung Budi Santoso, S.H. M.M.
4. Dr. Didik Mukrianto, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 Anggota dari 4 Anggota:

1. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi,S.E
2. H.M. Nasir Djamil, M.Si.
3. Drs. H. Adang Daradjatun
4. dr.H.R.Achmad Dimiyati Natakusumah.,S.H.,M.H.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 Anggota dari 3 Anggota:

1. Sarifuddin Sudding, S.H.,M.H.
2. H. Nazaruddin Dek Gam
3. Mulfachri Harahap.,S.H.,M.H.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 Anggota dari 1 Anggota:

- H. Arsul Sani, S.H. M.Si.

B. UNDANGAN: Jaksa Agung RI (Dr. ST. Burhanuddin., S.H., M. H.):

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT: Dr.Ir.H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum. (WAKIL KETUA/ F-PG)

Bagaimana Pak Trimed, bisa di mulia, baik.

Anggota Komisi III:

Kalau sama Jaksa Agung kok, lengkap sekali ini ya Komisi III ini, *full, full team*, kalau sama Jaksa Agung.

Anggota Komisi III:

KPK protes, KPK.

KETUA RAPAT:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI,
Yang terhormat Jaksa Agung, beserta seluruh jajarannya, serta hadirin yang kami muliakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, pada kesempatan pagi hari ini, kita bisa hadir melaksanakan kegiatan pembahasan fungsi anggaran, di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk Tahun Anggaran 2023, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa pun.

Sesuai dengan Laporan Sekretariat, telah hadir sebanyak 29, dari 53 orang Anggota Komisi III, dan 9 fraksi, dari 9 fraksi yang ada di Komisi III DPR RI. Oleh karena itu kuorum telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang MD3, maka perkenankanlah kami membuka rapat ini, dan kami mohon persetujuan, rapat ini kita nyatakan tertutup untuk umum setuju, setuju, setuju Pak ya JA.

**(RAPAT: TERBUKA UNTUK UMUM)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)**

Anggota Komisi III:

Izin Pimpinan, saya minta dicek juga, kalau tertutup, ini di zoom, kadang-kadang ada akun yang bukan bagian dari, minta sekretariat mengecek akun di zoom coba.

KETUA RAPAT:

Ini kalau dari Puspenkum, Kejaksaan Agung, dari Kabid Humas, mungkin enggak apa apa. Cuma kadang-kadang memang.

Anggota Komisi III:

Kalau bisa, enggak apa-apa, Kejaksaan mitra kita cukup yang ada di sini, enggak perlu masuk.

KETUA RAPAT:

Enggak, kalau Kabid Humas boleh Pak, Puspenkum boleh, karena ini kan bagian ini, sudah terkontrol juga dari Kejaksaan Agung, nggak apa apa dia ikut di situ, enggak apa apa kan Pak JA, kalau dari Kabid Humas, dari Puspenkum, ya Penkum 19 itu siapa tuh, itu di cek, Sudah. Kabid Humas, Puspenkum boleh. Kadang-kadang Agustiar Sabran pun, ada dua di situ, tolong dicek lagi ya, Bapak Ibu sekalian, dan mohon di atas, yang tidak berkepentingan selain dari Puspenkum Kejaksaan Agung, kami persilakan untuk meninggalkan tempat. Sudah steril Bapak, baik.

Terima kasih.

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Jaksa Agung, Pak Wakil Jaksa Agung, beserta seluruh jajaran Kejaksaan, yang hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk memenuhi undangan rapat kami Komisi III DPR RI, dalam rangka Pembahasan Anggaran Kejaksaan Agung 2023, Tahun 2023. Agenda tersebut yaitu : satu, Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023, kemudian, selamat datang Pak Sudding. Kemudian tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup.

Kami ingin mendapatkan persetujuan kembali, apakah rapat ini dapat kita akhiri pada pukul, paling lambat pukul 12:00, paling lambat 12:00, paling lambat ya, ya, kalau lebih cepat lebih baik.

(KETOK PALU 1X)

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf c tentang Peraturan DPR tentang Tata Tertib, bahwa tugas Komisi dalam Bidang Anggaran adalah membahas dan menetapkan alokasi anggaran, untuk fungsi dan program kementerian atau lembaga, yang menjadi mitra kerja komisi. Atas dasar Pasal 59 ayat 2

huruf c tersebut, dan siklus anggaran yang diberikan oleh Badan Anggaran Republik Indonesia, maka Komisi III DPR RI menjadwalkan kegiatan Pembahasan Anggaran Pagu Indikatif Mitra Kerja pada hari ini. Dan data yang kami terima, bahwa Pagu Indikatif 2023 Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebesar Rp.9.632.179.592.000,- (9 triliun 632 miliar 179 juta 592 ribu rupiah), dan usulan Tambahan Anggaran 2023 sebesar Rp.14.820.165.193.791,- (14 triliun 820 miliar 165 juta 193 ribu 791 rupiah). Dari anggaran tersebut Komisi III ingin mengetahui, digunakan untuk program atau kegiatan apa saja, dan apakah anggaran ini sudah dirasa cukup.

Selain itu, selain Pagu Indikatif 2023, Komisi III mendapatkan laporan hasil pemeriksaan BPK, IHPS ke II (dua) tahun 2021, Kejaksaan Republik Indonesia di beberapa daerah.

Untuk itu kami persilakan Saudara Jaksa Agung, dapat menyampaikan penjelasannya mengenai Pagu Indikatif dan usulan Tambahan Anggaran 2023.

Begitu pula bagaimana dengan tindak lanjut Kejaksaan RI, atas Laporan BPK tersebut, waktu kami persilakan.

JAKSA AGUNG RI (Dr. ST. BURHANUDDIN., S.H., M. H.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera buat kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, para hadirin sekalian.

Pertama-tama dan paling utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kami dapat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI, dalam rangka pembahasan Pagu Indikatif RKA-K/L dan RKP-K/L Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 2023.

Pada tahun 2021, merupakan sebuah momentum bersejarah bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia stidaknya terdapat dua momentum, Kejaksaan mendapat amanah yang berhubungan dengan perkembangan Kejaksaan.

Yang pertama, pada tahun, pada bulan Juli 2021, Kejaksaan telah diberi kepercayaan, dalam mengembangkan bidang baru yaitu Bidang Tindak Pidana Militer.

Dua, pada penghujung tahun 2021 tepatnya pada tanggal 31 Desember 2021, telah di undang, telah, telah diundang-undang kan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan perundang-undangan ini adalah sesuatu yang patut kami syukuri, sekaligus merupakan tantangan bagi seluruh Insan Adiyaksa dalam memenuhi amanat dan ekspetasi sebagai undang-undang tersebut. Selain itu saya memandangi Perubahan Undang-Undang Kejaksaan tersebut, tidak semata-mata merupakan, penguatan terhadap institusi Kejaksaan, namun yang lebih penting adalah suatu bentuk kepedulian dan komitmen Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, untuk memperkuat penegakan hukum, dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum yang lebih baik, dan mengupayakan pemenuhan rasa keadilan masyarakat.

Berkaitan dengan pembahasan Pagu Indikatif, RKA K/L dan RKP K/L 2023, tentunya merupakan bagian dalam rangka, capaian enam tujuannya akan dicapai selama lima tahun.

Yang pertama adalah meningkatkan, meningkatnya kualitas sumber daya manusia Aparatur Kejaksaan.

Dua, meningkatkan akuntabilitas Kejaksaan dan integritas Aparatur Kejaksaan.

Tiga, meningkatnya peran Kejaksaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Empat, meningkatnya optimalisasi kinerja Aparatur Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana.

Enam, meningkatnya upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara.

Tujuh, meningkatnya kualitas kinerja Kejaksaan berbasis teknologi informatika.

Dalam rangka mencapai enam tujuan tersebut Kejaksaan pada tahun 2022, telah menetapkan tujuh program prioritas :

Yang pertama, melaksanakan penegakan committed integral yang menempatkan kebijakan penegakan hukum sebagai satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional.

Kedua, hadirkan penegakan hukum yang berlandaskan hati nurani untuk terwujudnya keadilan substantif.

Tiga, tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, dalam rangka meningkatkan indeks prestasi, indeks persepsi korupsi.

Empat, percepat penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, secara tuntas, adil, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lima, tingkatkan sistem pengawasan internal menuju sumber daya manusia Kejaksaan yang profesional, dan berintegritas.

Enam, tingkatkan kepercayaan publik, melalui peningkatan kinerja dan strategi komunikasi hukum, yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif.

Tujuh, tingkatkan kredibilitas, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan, dan maturitas sistem pengendalian internal Pemerintah.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR yang saya hormati. Pada kesempatan ini, kami kembali menyampaikan bahwa, penyerapan anggaran, Kejaksaan sampai dengan 31 Desember 2021, untuk seluruh Satuan Kerja Kejaksaan, dari total alokasi anggaran sebesar, Rp.8.463.850.872.000,- (8 triliun 463 miliar 850 juta 872 ribu rupiah), telah terealisasi sebesar Rp.8.470.379.560.591,- (8 triliun 470 miliar 379 juta 560 ribu 591 atau 1 rupiah), atau 100,08%. Hal tersebut juga disertai dengan opini BPK atas Laporan Keuangan Kejaksaan, yang memperoleh predikat WTP, dalam tahun secara berturut-turut 5 kali. Di samping itu realisasi Pemerintah, penerimaan maksud saya, di samping itu penerimaan, realisasi penerimaan negara bukan pajak, atau PNBK Kejaksaan, tahun 2021 mencapai Rp.1.022.224.973.304,- (1 triliun 22 miliar 224 juta 973 ribu 304 rupiah), atau 155%, dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar, Rp.659.125.178.719,- (659 miliar 120 juta 178 ribu 719 rupiah).

Selanjutnya realisasi PNBK Kejaksaan, sampai dengan bulan Juni 2022, telah mencapai Rp.700.380.619.570,- (700 miliar 380 juta 619 ribu 570 rupiah), atau 105,59%, dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp.663.303.247.000,- (633 miliar 303 juta 247 ribu rupiah).

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR yang saya hormati.

Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya, mendapatkan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan, dan belanja negara, yang selalu ditetapkan setiap tahunnya, situasi nasional belum stabil, mengingat Covid-19, mengharuskan Kejaksaan untuk berhati-hati dan memanfaatkan sebaik-baiknya anggaran yang diberikan, dengan tetap menjamin berjalan tugas dan fungsi kewenangannya dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan berikan rasa adil bagi masyarakat.

Rencana kerja Kejaksaan tahun 2023, merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang disusun sebagai, penjabaran tahun keempat, pelaksanaan rencana strategis Kejaksaan Tahun 2022 2004. Selain itu menyusun rencana kerja juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan, dan Penganggaran

Pembangunan Nasional, Rencana Kerja dan Anggaran Pembangunan Nasional Tahun 2023, memuat arahan, kebijakan Kejaksaan tahun, demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana, dan sistem, dan sistematis yang tanggap atas perubahan.

Dalam rangka mencapai visi, misi Kejaksaan, Kejaksaan mempunyai dua program sesuai dengan tugas dan kewenangannya di tahun 2003.

Yang pertama adalah, Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Masyarakat. Penanggung jawab dari program penegak hukum dan pelayanan hukum adalah lima eselon satu, yaitu Eselon satu Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Tindak Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer.

Dua, Program Dukungan Manajemen Penanggung Jawab dan Program Dukungan Manajemen Internal adalah tiga Eselon satu, yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Pengawasan, serta Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksanaan untuk melaksanakan rencana kerja Pemerintah, dan rencana kerja anggaran tahun 2023, telah menyampaikan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tugas fungsi tahun anggaran 2023, kepada Menteri Keuangan dengan Surat Jaksa Agung Nomor B-16/01/2022 tanggal 17 Januari 2022, dengan total kebutuhan anggaran sebanyak Rp24.567.045.690.624,-. Kami berharap, dengan adanya pembahasan pagu indikatif RKA-K/L, dan RKP-K/L tahun 2003. Kejaksaan agung bersama Komisi III, serta dukungan penuh dari Komisi III selaku mitra kami, dapat menunjang, pemenuhan anggaran di tahun 2023, sehingga program kerja Kejaksaan tahun 2023 dapat berkesinambungan, melanjutkan program prioritas di tahun 2022 tersebut.

Sesuai dengan undang-undang yang kami terima, pada kesempatan ini, kami memaparkan pagu indikatif RKA dan RKP Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 sebagai berikut.

Satu, Pagu Indikatif Kejaksaan 2023, berdasarkan surat pagu indikatif SPPI, Menteri Keuangan, dan menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, nomor S-353 dan B-301, pada tanggal 18 April 2022, Hal, Pagu indikatif belanja K/L TA 2023, yang pada pokoknya menyatakan, Kejaksaan memperoleh pagu indikatif tahun 2022 sebesar Rp.9.632.179.592.000,-, berdasarkan Surat Pagu Indikatif Tahun 2023 tersebut, untuk rincian dan program adalah sebagai berikut.

Pertama, Program penegakan hukum, dan pelayanan hukum sebesar Rp.521.243.172.000,- (521 miliar 243 juta 172 ribu rupiah).

Dua, Program dukungan manajemen sebesar Rp.9.119.136.420.000,- (9 triliun 119 miliar 136 juta 420 ribu rupiah).

Apabila berdasarkan sumber pendapatan Kejaksaan Republik Indonesia menggunakan tiga sumber yaitu, Rupiah Murni sebesar 7,5 triliun, Rupiah Murni Pendamping sebesar 6,2 miliar, Pinjaman Luar Negeri sebesar 1,5 triliun. Rincian anggaran perbidang. Hasil penyusunan pagu indikatif Kejaksaan tahun 2023, yang melibatkan Bidang-bidang pada Kejaksaan Agung, 33 Kejaksaan Tinggi, 435 Kejaksaan Negeri, dan 60 Cabang Kejaksaan Negeri, serta Perwakilan Kejaksaan di Luar Negeri, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musrembang Kejaksaan tahun 2002, dan rapat trilateral meeting antara Kejaksaan, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, pada tanggal 27 Mei 2002, dan tanggal 2 Juni 2022, Anggaran Kejaksaan tahun 2022, per bidang, yang dapat disusun sebagai berikut.

Bidang Intelijen Pusat, dan Daerah sebesar Rp.67.354.846.000,-, Bidang Pidana Umum Pusat dan Daerah sebesar Rp.239.647.681.000,-, Bidang Pidana Khusus Pusat dan Daerah Rp.257.158.582.000,-, Bidang Pidum Pusat dan daerah sebesar Rp20.107.084.000,-, Bidang Pidana Militer Pusat dan Daerah Rp14.492.248.000,-, Pemeliharaan Barang Bukti di Bidang Teknis sebesar Rp27.941.927.000,-.

Selanjutnya dapat kami sampaikan terkait dengan Program Dukungan Manajemen, yaitu di Bidang Pembinaan Pusat dan Daerah. Belanja modal pengadaan sarana dan prasarana di pusat dan daerah, di Bidang Pengawasan Pusat dan Daerah serta Bidang Pendidikan Pelatihan Pusat dan Daerah, Bidang Pembinaan Pusat dan Daerah sebesar 6,1 triliun. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana di Pusat dan, Daerah sebesar 2,6 triliun, Bidang Pengawasan Pusat dan Daerah sebesar 20 miliar, Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebesar 141,8 miliar.

Tiga, Kegiatan Prioritas Anggaran Tahun 2023. Sesuai lampiran B Surat Bersama Pagu Indikatif, Tahun Anggaran 2023, untuk kegiatan Program Prioritas Nasional Kejaksaan Tahun 2023. Pada Rapat *Trilateral Meeting* terdapat penyesuaian kegiatan dan anggaran dapat dianggarkan, sehingga anggaran kegiatan Prioritas Nasional menjadi sebesar Rp.207.181.402.000,- (207 miliar 181 juta 402. ribu rupiah).

Empat, Usulan Tambahan Anggaran Kejaksaan Tahun 2023. Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri PPN, Kepala Bappenas S-53 dan B-301, tanggal 18 April 2022, perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian Lembaga Tahun 2023, Kejaksaan Tahun 2023 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp.9.632.179.592.000,- (9 triliun 632 milar 179 juta 592 ribu rupiah), yang dipergunakan untuk menyusun Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023. Saran pagu indikatif tersebut, masih jauh dari kebutuhan riil Kejaksaan, yaitu sebanyak Rp.24.567.045.690.624,- (24 triliun 567 miliar 45 juta 690 ribu 624 rupiah), sebagaimana Surat Jaksa Agung Nomor B-16, tanggal 17, Januari 2022, kepada Menteri Keuangan. Sehingga terdapat besaran pagu indikatif dimaksud, telah dilakukan *mapping* ternyata postur anggaran tersebut belum

cukup untuk memenuhi anggaran kebutuhan Rencana Kerja Prioritas Kejaksaan Tahun 2023.

Bahwa hasil penyusunan pagu indikatif yang melibatkan bidang-bidang pada Kejaksaan Agung, 33 Kejaksaan Tinggi, 435 Kejaksaan Negeri dan 63 Cabang Kejaksaan, masih kekurangan anggaran, untuk kebutuhan tahun 2023, sebesar Rp14.820.165.193.797,-. Kiranya kami mohon dukungan dari Komisi III.

Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa kami telah bersurat, dengan surat nomor B-105, tanggal 6 Juni 2022, perihal Permintaan Tambahan Anggaran Kejaksaan, pada Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.820.165.193.797,-, yang kami sampaikan kepada, satu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Ketua Komisi III, dan Ketua Badan Anggaran DPR Republik Indonesia.

Pimpinan serta Anggota Komisi III DPR yang saya hormati, demikianlah penjelasan tertulis yang kami sampaikan kepada Pimpinan dan para Anggota Komisi III, yang saya hormati, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, dalam upaya pengabdian kita, kepada masyarakat bangsa dan negara.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.
Om santi santi santi om,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

KETUA RAPAT:

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, kita telah mendengarkan pemaparan dan penjelasan dari Saudara Jaksa Agung, perlu kami sampaikan bahwa, saat ini kita melaksanakan rapat dengan mitra kerja, dalam rangka fungsi anggaran. Untuk itu kami minta Anggota Komisi III DPR RI, yang akan memberikan pertanyaan, hanya terkait dengan anggaran mitra kerja.

Kami persilakan penanya pertama dari Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDI PERJUANGAN (ICHSAN SOELISTIO):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Komisi III, rekan-rekan Komisi III yang saya hormati.

Menyimak paparan disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, dengan tambahan anggaran pagu indikatif yang diberikan hanya sekitar 9 triliun ya

Pak Jaksa Agung, dan minta tambahan 14,24, atau 14,8 lah, 14,24 itu untuk dukungan manajemen. Tetapi yang besar daripada ini, daripada 14,2 untuk dukungan manajemen ini mohon, penjelasannya Pak, Pak Jaksa Agung, karena kebutuhan, sarana, dan prasarana Satuan Kerjanya 3,4 triliun, dan kebutuhan sarana pesanan, prasarana Satuan Kerja Pusatnya 9,8 triliun Pak Jaksa Agung. Nah mengingat ini kan kita ada IKN nih Pak, mau pindah Ibu Kota, apakah 9,8 triliun ini adalah bagian untuk pembangunan pusat, Kejaksaan Agung Pusat nanti di IKN, atau untuk pengembangan di sini Pak, karena nanti kalau pengembangan di sini, nanti kalau benar-benar pindahkan mubazir ini Pak 9,8 triliun. Mungkin kalau yang lainnya saya kira, kita dapat menyetujui dan PNPB Bapak yang cukup fantastis berhasil, melebihi daripada target.

Dan berikutnya adalah yang menarik walaupun selisihnya cuma 0,8% Pak, penyerapan anggaran Bapak itu seratus 100,08% Pak, sedangkan kita ini biasanya berdasarkan penyerapan, anggaran kita besarkan berdasarkan penyerapan, ini ada 0,08%, mungkin in-material Pak, tapi menarik Pak, karena bisa lebih gitu, gitu, lebih dari anggaran. Jadi yang lainnya kami punya prinsip yang menurut menyetujui anggaran diajukan oleh Pak Jaksa Agung, hanya butuh penjelasan sedikit Pak tentang kebutuhan untuk sarana prasarana ini.

Terima kasih Pimpinan.

KETAU RAPAT:

Baik. Saya menawarkan kepada Pak Jaksa Agung, kalau masih lanjut atau kurang, lanjut Pak ya, ya baik, kita tanya dulu Pak.

Dari Fraksi Golkar Pak Supri, oh Pimpinan ada yang mau, sebentar Pak Supri, ada Pimpinan mau menyampaikan dulu, Pak Desmond Silakan.

F-P.GERINDRA (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H.,M.H.):

Terima kasih.

Tadi saya cuma mengingatkan, kalau kita lihat dari paparan Pak Jaksa Agung, pagu indikatif itu kan sembilan triliun lebih, sementara pagu indikatif institusi Kepolisian 97 triliun, kebutuhan riil Kejaksaan Agung 24. Padahal proses penegakan hukum dari penyidik dan penyidikan, sampai pada penuntutan, kalau kita lihat di anggaran Polri, tolong dilihat nanti anggaran Polri, itu untuk penyidik dan penyidikan sampai P21 diproses di peradilan, itu berapa biayanya, agar kita bisa mensejajarkan ya, Anggaran Kepolisian dan Anggaran Kejaksaan, kalau ini Anggaran Kepolisian 97 pagu indikatifnya, sementara Kejaksaan Agung cuma 9 triliun lebih, ini kan cuma 10% dari Anggaran Kepolisian, walaupun kita tahu dari anggaran 97 triliun itu, untuk ini, untuk pengamanan Pemilu dan macam macam, tapi kita kan harus lihat isinya nanti, agar Komisi III bisa melihat jernih, saya harap Bapak-bapak kita semua untuk melihat jernih, bagaimana dengan anggaran penegakan hukum Kejaksaan dan Kepolisian menjadi seimbang, kita tidak bisa bandingkan

dengan KPK, kenapa, karena KPK punya institusi Kejaksaan ya jadi satu, tapi output penegakan hukumnya tidak bisa juga disandingkan.

Nah ini yang maksud saya agar Pak Johan Budi biasanya kritis tentang ini untuk melihat ini Pak Johan ya, jangan kita melihat bahwa 9 triliun dan 97 triliun, dan minta tambahan lagi jadi berapa. Nah ada hal di sini yang selisih dari 9 triliun, jadi 24 berapa, tambahan yang harus kita bantu, agar kita juga pada saat merasionalkan pendapat fraksi-fraksi, dalam menilai kinerja Jaksa Agung, yang berbasis kinerja, anggaran itu juga diperhatikan, kenapa, ini ada hal yang, yang dari dulu kita masalahkan. Sebenarnya anggaran penegakan hukum ini berapa, nah perlu dilakukan, kita pernah membicarakan ini, kita undang beberapa kali, beberapa kali Pak apa, Bu Sri Mulyani enggak datang, karena kita ingin melihat ini secara utuh gitu loh, agar kita bisa, oh keluar dari Pemerintah berapa, untuk Kejaksaan dan seperti ini. Secara terbuka kan kita bisa mem-*balance*, karena keputusan apapun, bukan Banggar besar yang menentukan saya ingatkan, bukan Banggar besar yang menentukan, tapi kita lah yang menentukan setuju atau tidak setuju anggaran mitra kita. Nah saya mengajak Bapak Ibu sekalian, untuk memelototi anggaran ini, agar kita melihat kinerjanya. Itu yang bisa sampaikan Pak Adies, untuk mengingatkan kita-kita semua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Supri.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III,
Yang saya hormati Pak Jaksa Agung, Pak Wakil Jaksa Agung, Pak Jambi.
dan seluruh jajaran yang sempat hadir pada kesempatan ini, di ruangan ini.

Hari ini kita membahas soal anggaran. Kalau bicara tentang anggaran, maka perlu yang saya bahas pertama adalah seberapa besar kepercayaan lembaga yang berwenang, yang memeriksa keuangan daripada Kejaksaan Agung. BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP, enam kali berturut-turut, dari 2016 sampai 2020, kalau begitu modelnya maka, sepintas kami menyatakan, karena ini saya berbicara atas nama Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Golkar memandang setelah melihat kepercayaan BPK terhadap Lembaga Kejaksaan Agung, dalam mengelola keuangan, maka Golkar tidak memiliki sebuah keraguan sedikit pun, apa yang diminta, mulai dari pagu indikatif 2023, 9,6 triliun, ditambah lagi 14 triliun, menjadi 24 triliun, menjadi kebutuhannya. Partai Golkar tidak ada keraguan untuk memberikan persetujuan, itu *clear* satu Pak jawabnya. Yak demi bangsa dan negara, kepentingan untuk rakyat secara umum. Ya, kenapa saya katakan demikian, karena pada tahun 2020, tercatat Kejaksaan dengan seluruh jajaran di Republik Indonesia ini, mampu memberikan penyelamatan keuangan negara sebesar sembilan belas koma sekian triliun.

Jadi kalau hanya Pak Jaksa Agung meminta 24 triliun untuk kebutuhan itu, demi penyelamatan keuangan negara yang lebih besar, demi kinerja-kinerja jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia yang lebih bagus, apa daya kami untuk menahan itu, iya kan. Ini kita berbicara tentang realita Pak Sudding, realitanya seperti ini modelnya, olehnya itu Pak Jaksa Agung, saya mewakili Partai Golkar menyatakan singkat, setuju dengan pagu indikatif, berikut kebutuhan jajaran Kejaksaan 24 triliun. Saya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan, antara Kepolisian dengan Kejaksaan, yang notabene sebagai penegak hukum, saya tidak ingin membandingkan, sudah disinggung tadi Pak Desmond, menyatakan bahwa, pagu indikatif dari Kepolisian 95 triliun, 97 triliun, kemudian permintaan kebutuhan kurang lebih 40 triliun, saya kira lebih seratus triliun ini, tidak bermaksud membanding-bandingkan Kejaksaan Agung rela dan ikhlas kita perjuangkan setelah menyetujui kita memperjuangkan lagi, kenapa? Dua tahun terakhir ini, jajaran Kejaksaan Agung ini memberikan sebuah kepuasan publik yang sangat bagus, ini tidak bisa ditutup-tutupi, dua tahun terakhir ini Pak Jaksa Agung, kami sebagai mitra kerja Bapak, berbangga membaca setiap hari berita-berita, kecepatan, ketangkasan, yang Bapak miliki dengan seluruh jajarannya, bahwa bahkan bisa lebih cepat dibanding dengan penegak hukum lainnya. Ini adalah terobosan baru Kejaksaan Agung, kira kira begitu Pak Kadir.

Saya kira itu Pak Jaksa Agung, yang ingin saya sampaikan terima kasih Pak Ketua Adies, ini kami sudah diberikan kesempatan untuk berbicara sebagai Fraksi Partai Golkar, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETEUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan Gerindra.

F-P GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH. M.Hum.):

Makasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati,
Pak Jaksa Agung beserta jajaran yang saya hormati.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Pak Jaksa Agung, tadi pagi saya nonton Garuda TV. Garuda TV itu ada di DPP Gerindra Pak. Ternyata hasil survei, tingkat kepuasan public dalam penegakan hukum, terhadap Kejaksaan meningkat, bahkan melampaui kepuasan publik terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, tadi pagi saya lihat di *text line* Garuda TV. Nah pagi ini saya mendapat informasi ternyata memang, Kejaksaan Agung dalam pertanggungjawaban keuangan,

lewat kinerjanya mendapat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK sejak 2016, apa yang saya lihat itu ternyata terjawab, tetapi kemudian atas usulan pagu indikatif dari Kejaksaan Agung, yang kemudian mendapat revisi dari *tripartit*, dari 24 triliun menjadi 9 triliun, ini sesuatu yang memprihatinkan. Apalagi kalau saya baca di halaman 8 (delapan), ini menyedihkan, sebagai lembaga negara satu-satunya yang punya kewenangan atas nama negara melakukan penuntutan dalam penegakan hukum, saya melihat konstruksinya menjadi sangat memprihatinkan Pimpinan, dari 9,6 triliun lebih itu, ternyata 9,1 triliun ya itu memang dibutuhkan hanya untuk program dukungan manajemen, itu berarti dari pusat sampai ke daerah. Sehingga yang tersisa ya, untuk program penegakan dan pelayanan hukum yang tadi mendapat apresiasi publik, mendapat WTP, berhasil mengembalikan keuangan negara, sampai 19 triliun lebih itu, itu hanya 521 miliar lebih.

Jadi atas izin Pimpinan Fraksi saya, ini ada Pak Desmond di sini, saya ingin mengatakan, bahwa usulan pagu indikatif 9,6 triliun yang disetujui oleh tripartit, ini memang sangat kurang memadai, kenapa? Karena usulan pagu indikatif dari Kejaksaan Agung hemat saya, itu pasti sudah dengan menyusuri semua kebutuhan bagi peningkatan pelayanan penegakan hukum, sehingga apresiasi publik yang selama ini sudah baik atas kinerja Kejaksaan Agung, ini seandainya pun belum bisa ditingkatkan, tapi sudah bisa dipertahankan. Oleh karena itu atas semua prestasi yang baik ini, maka berkaca dengan pidato Pak Supriansa, kayanya saya juga tidak berdaya untuk menolak, kecuali memberikan dukungan penuh ya, agar usulan tambahan 14,8 triliun itu memang bisa diperjuangkan, agar kinerja Kejaksaan Agung bisa tetap prima dalam penegakan hukum dan memuaskan keinginan penegakan hukum yang ada pada masyarakat. Saya kira itu Pimpinan, makasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kami persilakan selanjutnya Nasdem. Yak Pak Jaki kosong.

F-P NASDEM (Drs. Y. JACKI ULY, M.H.):

Terima kasih.

Bapak Pimpinan rapat beserta rekan-rekan Anggota Dewan yang hadir pada pagi hari ini.

Kajagung RI, beserta jajarannya saya banggakan.

Mengamati apa yang disampaikan oleh Bapak, saya ulangi,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengamati apa yang dipaparkan oleh Bapak Kajati, mengenai kinerja maupun prestasi yang sudah didapat, saya sangat mengapresiasi. Kami tahu bahwa jajaran Kejaksaan Agung RI ini tersebar di seluruh Indonesia, di tiga puluh tiga Kajati, kemudian Kajarinya 400 (empat ratusan) lebih, dan ini pasti berat, saya cukup mengerti. Belum lagi dihadapi dan kejadian-kejadian seperti Covid-19, pemindahan ibu kota negara, yang pasti peran sertanya besar sekali disitu. Perlu kami juga membahas mengenai anggarannya dibutuhkan sebesar 24 triliun, yang diajukan, kemudian dibahas oleh tripartit dan disetujui sekitar 9 triliun memang ini saya rasa cukup menyedihkan

Karena kerjanya cukup berat, kami melihat sendiri di lapangan bahwa, peran daripada Kejaksaan Negeri banyak sampai di pedalaman, untuk mengambil apa, bahan-bahan daripada hasil penyidikan yang ada maupun penyidikan yang mereka lakukan, untuk bahan penuntutan. Jadi menurut saya penambahan yang diajukan sebesar 14 triliun, ini perlu segera untuk kita setuju, saya dalam hal ini Partai Nasdem, karena kalau pun itu ditambah, juga dengan kebutuhan 24 triliun itu belum mencapai, masih 23 triliun sekian, kan ini kebutuhan 24 triliun yang diajukan. Mudah-mudahan dengan tambahan 14 triliun ini, minimal mencapai dasar kebutuhannya ini Bu, sebesar 24 triliun itu. Sehingga kita bisa melihat kinerja yang lebih baik lagi ke depan, untuk penyelesaian masalah-masalah yang menyangkut dengan penuntutan, karena kejaksaan ini lebih banyak di penuntutan walaupun, di penyidikan juga ada mereka bekerja, dalam kasus tertentu.

Saya rasa demikian, jadi dari Nasdem kami menyetujui untuk penambahan anggaran sebesar 14 triliun koma sekian. Semoga ini dapat di setuju oleh rekan-rekan yang lain, demikian dan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Waalaiikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi PKB.

F-PKB (MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H.):

Makasih Pimpinan.

Seizin Ketua Fraksi, ijin dulu, ijin ke Fraksi dulu, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati,
Pak Jaksa Agung dan seluruh jajarannya yang saya hormati, saya muliakan.

Pertama saya apresiasi dulu, paparan dari Pak Jaksa Agung sangat baik, ini bahannya juga baik sekali ini Pak, sangat jelas kita membacanya. Dari anggaran yang Bapak butuhkan, dari awal 9 triliun ini, dibutuhkan

kekurangan sekitar 14 triliun kan Pak Jaksa. Prinsipnya dengan kinerja hebat Bapak 2021 kemarin, anggaran ini cukup kecil Pak Jaksa Agung. Jadi kinerja hebat dengan berapa perkara kasus, kasus besar yang ditangani oleh Pak Jaksa Agung ini menurut saya sangat wajar, anggaran ini untuk ditambah, apalagi PNBPN yang Kejaksaan hasilkan ini luar biasa, targetnya sudah sampai 155%, ini kan luar biasa. Jadi memberi anggaran sesuai dengan kinerja hebatnya, ini sudah, sudah sangat cocok dan sangat baik menurut saya.

Pak Jaksa Agung hanya, tadi Pak Desmond sampaikan sebetulnya benar, ada keterkaitan, antara memang kita bicara tidak membandingkan antara mitra, tapi anggaran Polisi dalam hal penegakan hukum, dengan Kejaksaan ini agak berbeda, sedangkan kawan-kawan Kejaksaan pun, tidak bisa menolak sebetulnya perkara-perkara yang masuk dari kawan Kepolisian.

Nah contoh, saya lihat di sini, sebetulnya ada anggaran Jampidsus misalnya, total anggaran 257 miliar, apakah ini cukup. Nah memang kalau bicara cukup pasti sudah dapat kajian ya, tapi menurut saya, anggaran ini harus terus diperjuangkan untuk lebih besar kedepannya, karena banyak sekali perkara di daerah, yang akhirnya, anggaran daerah itu, kawan-kawan Kejaksaan di daerah tidak cukup, kalau penanganan perkara, ya hebatlah kerjanya dengan, dengan anggaran yang ada, tapi perkaranya biasanya melebihi melampaui dari target perkara yang ada. Karena memang tadi, tidak bisa lagi sinergi dengan menolak dari kawan-kawan penegakan hukum yang lain, dalam hal ini Kepolisian. Nah menurut saya Pak Jaksa Agung, ke depan mudah-mudahan anggarannya terus disesuaikan, misalnya saya sedikit saja anggaran dari Datun, Datun ini hanya 20 miliar, kecil sekali, di daerah itu, bayangkan kalau ini dibagi berapa daerah di sana, ini kira-kira berapa anggaran mereka, sedangkan yang dilakukan kawan-kawan Datun di daerah itu luar biasa, penyelamatan aset baik daerah maupun pusat, terus memberi keuntungan begitu banyak itu di Datun. Nah mudah-mudahan ini diperhatikan lebih, di Pidum pun sama menurut saya. Jadi anggaran-anggaran ini relatif sebetulnya masih kecil menurut saya, mudah-mudahan ke depan akan terus naik.

Jadi prinsipnya Pak Jaksa Agung, kami Fraksi PKB dengan seijin dengan Ketua Fraksi yang di dekat Fraksi saya, izin, izin Ketua. Jadi kita sampaikan sebetulnya bukan hanya mendukung, kita akan terus memperjuangkan, apalagi beliau sekarang Wakil Ketua Banggar, kalau kata Pak Ketua mudah-mudahan di sini kuncinya.

Nah jadi mudah-mudahan Pak Jaksa Agung, kita terus perjuangkan ini, kerja hebat Pak Jaksa Agung dan jajaran terus dipertahankan, dan mudah-mudahan ini memberikan, kalau kata Pak Johan Budi buat apa, Pak Johan Budi kira-kira buat apa perjuangan kita ini, buat bangsa dan negara akan lebih baik lagi, Aamiin, terima kasih.

*Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makasih Pak, lanjut, Fraksi Partai Demokrat, ada? Silakan selanjutnya Fraksi Partai, ya tadi nggak ada yang mau, ada yang mau ?

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR AL-HABSY):

Ambil alih PKS dulu.

KETUA RAPAT:

Ya Silakan, jangan ragu-ragu, kenapa kok diam, Pak Benny nggak mau, ya, nggak, nggak, nggak ada terakhir kalau lewat, lewat saja.

F-P DEMOKRAT (DR.BENNY KABUR HARMAN, S.H., M.H.):

Saya aja, tapi terakhir nanti.

KETUA RAPAT:

Eggak urutannya begitu pak, kalau, endak sekarang aja Pak, oke sekarang berarti Fraksi Demokrat, melewatkan, berarti nanti perorangannya mungkin kalau sempat, ya pokoknya dia abstain apa apa. Pak Santoso mau apa ?

F-P DEMOKRAT (DR. H. SANTOSO, S.H., M.H.):

Fraksilah, kalau Pak Benny kembali.

KETUA RAPAT:

Ini Fraksi,

F-P DEMOKRAT (DR. H. SANTORO, S.H., M.H.):

Oke siap.

KETUA RAPAT:

Waktu tinggal dua menit.

F-P DEMOKRAT (DR. H. SANTOSO, S.H., M.H.):

Makasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua,

Para Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati,
Jaksa Agung, beserta seluruh pejabat utamanya.

Merespons apa yang telah disampaikan, yang terhormat Pak Jaksa Agung tentang usulan anggaran, di mana tadi telah disampaikan bahwa telah disetujui tentang pagu indikatifnya di tahun 2023 yaitu sebesar 9,6 triliun. Saya langsung saja bahwa yang dibutuhkan itu dalam rangka menunjang kinerja Kejaksaan di tahun 2023, dan juga ada tugas-tugas pemerintah dan negara, dalam rangka penyelesaiannya yang ditangani oleh Kejaksaan Agung sebesar 14,8 triliun. Dalam forum ini, saya mendukung apa yang menjadi usulan Jaksa Agung, cuma mendukung di sini tidak sepenuhnya, apa yang menjadi angka 14 triliun koma delapan itu. Kenapa, karena saya ada argumentasi, pertama bahwa yang diusulkan untuk penambahan ini melebihi dari pagu indikatif 2023, jadi sudah hampir 150% dari 9,6 sekian triliun diusulkan tambahan 14,8 triliun, saya melihatnya usulan ini kurang ideal.

Yang berikutnya, argumentasi saya adalah bahwa apa yang diusulkan untuk penambahan ini juga, banyak yang menurut saya Pak Jaksa, belum menjadi prioritas juga, yang akan mengurangi kinerja dari jajaran Jaksa Agung. Misalnya ya saya melihatnya soal program dukungan manajemen, ini kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI, ini fantastis, 13,6 triliun.

Jadi menurut saya itu juga hal yang kurang rasional, meskipun mungkin pembahasannya sudah dilakukan secara, sesuai dengan ketentuan yang ada, dan dilihat dari apa yang terjadi di lapangan. Namun dari usulan ini, saya melihatnya sangat fantastis, dan tidak mungkin ini bisa direalisasikan itu, saya malah lebih senang jika, usulan 14 triliun ini jika tidak dipenuhi semua Pimpinan yang saya hormati beserta Anggota Komisi III, kita prioritaskan itu kebutuhan sarana dan prasarana Satuan Kerja Daerah, sebesar 3,4 triliun, kenapa, karena kita juga harus realistis, bahwa daerah ini sangat membutuhkan dalam rangka menopang kinerja mereka, karena Jaksa Agung tanpa ada tanga-tangan di daerah, saya yakin tidak bisa bekerja maksimal, termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang lain, selain dari di Jaksa, di Tingkat Pusat, maksud saya di Kejaksaan Agung, menurut saya kalau memang anggaran ini tidak dapat terpenuhi sesuai dengan usulan Jaksa Agung sebesar 14,8 triliun, maka saya sangat berharap agar Komisi III memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh jajaran Kejaksaan di daerah, ini yang harus diprioritaskan.

Jadi kalau seandainya memang dari 14 ini banyak yang tidak dipenuhi karena keterbatasan fiskal di tahun 2023 yang akan datang, maka saya mengusulkan agar kebutuhan-kebutuhan sarana, prasarana untuk jajaran Kejaksaan di daerah-daerah, harus menjadi prioritas dan diperjuangkan, seperti yang selalu disampaikan oleh yang terhormat Ketua Komisi, Pak Bambang Pacul, bahwa forum ini adalah kita di samping menyetujui usulannya, juga akan memperjuangkannya menjadi usulan Mitra-mitra Komisi III. Saya kira itu Pimpinan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ini kebetulan yang diusulkan itu untuk daerah semua ini Pak. Ini diusulkan memang daerah semua.

F-DEMOKRAT (DR. H. SANTOSO, S.H., M.H.):

Banyak yang enggak Pak.

KETUA RAPAT:

Intinya setuju tapi ya ?

F-DEMOKRAT (DR. H. SANTOSO, S.H., M.H.):

Daerah, iya ya daerah.

KETUA RAPAT:

Intinya setuju toh.

F-DEMOKRAT (DR. H. SANTOSO, S.H., M.H.):

Untuk daerah.

KETUA RAPAT:

Kalau endak setuju nanti kita tanya Pak Benny, setuju Pak Demokrat, oh belum ? Ya jadi ditunggu perintah pak Benny.

Jadi belum Pak Santoso, tunggu perintah Pak Benny, jadi nanti Benny ngomong apa gitu loh, itulah Pak Santoso baik-baik, jangan berani-berani ngomong, kalau belum seijin Pak Benny itu .

F-DEMOKRAT (DR. H. SANTOSO, S.H., M.H.):

Iya-ya, iya siap.

KETUA RAPAT:

Lanjut selanjutnya PKS.

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR AL-HABSY):

*Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wah, ngeri Pak Sekjen langsung.

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR AL-HABSY):

Pak Dimiyati saya izin dan Pak Adang, kalau ada Pak Nasir, saya juga minta izin, dan izin Pak Ketua.

Pertama saya sampaikan apresiasi kepada Pak Kajagung, sampean tuh gerakannya sak set-sak set enggak kelihatan, tapi gini-gini menyelesaikan banyak masalah ya. Setelah kemarin gulung Mafia Eksport Minyak Goreng, sekarang seperti saat ini sudah menggusut Mafia Eksport Baja, import baja. Saya senang pak, dan saya bangga, mainkan terus Pak, saya dukung sebagai Partai dari Partai Keadilan Sejahtera, yang akan berkuasa pelan-pelan. Kita mau bekerjasama ini Pak, sama PDI semoga-moga sampai ke negara ya, Pak Pacul enggak dengar, alhamdulillah.

Jika dilihat realisasi penerimaan negara bukan pajak PNPB Pak Kajagung dan jajaran, Kejaksaan RI pada tahun 2021 sangat bagus, mencapai 1.022. 224.973.304, saya bacanya susah Pak, atau 155%, dan estimasi pendapatan di tetapkan sebesar 659.125.178.719.

Kalau boleh tahu Pak, kalau boleh tahu, yang menyebabkan kan capaiannya bisa setinggi itu, kok bisa naik 155 kenapa Pak, saya pikir perlu, perlu penjelasan.

Kemudian sektor mana yang memberikan PNPB tertinggi untuk Kejaksaan Agung Pak, apakah masih itu dioptimalisasi lagi endak, saya mendapat informasi, Kejaksaan Agung sudah banyak menerapkan *restorative justice* ya dalam penanganan perkara. Kemarin Pak di dapil saya Kalimantan Selatan Dapil satu, semoga orang di Kalimantan Selatan dengar Pak, kampanye, sedikit Pak, waktu tinggal satu tahun delapan bulan, tanggal 4 Februari, semoga pada milih saya. Kemarin itu saya ada dua perkara *restorative justice* Pak ya, apakah pola *restorative justice* ini berpengaruh pada anggaran? Misalkan apakah menambah efisiensi anggaran, atau bagaimana? saya pikir ini perlu penjelasan.

Saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai penutup pantun yang indah buat Pak Kajagung;

Terbang tinggi si burung dara;
Pak Kajagung dengar enggak,
Terbang di atas istana raja;
Kejaksaan terdepan tuntaskan perkara;
Kini mulai gulung mafia ekspor baja.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Jangan cukup, modalnya pas-pasan.

KETUA RAPAT:

Bentar lagi daging sapi Bib.

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR AL-HABSY):

Jangan.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Fraksi PAN.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Ini maksudnya apa tadi ini, baja dengan sapi.

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR AL-HABSY):

Ya sapi udah lama, udah lewat.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Oh udah lama ya, lewat ya.

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR AL-HABSY):

Nanti kita buat yang baru.

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR AL-HABSY):

Ente nih demen nyindir-nyindir ya.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Eenggak soalnya balas pantun antara baja dan sapi, makanya diperjelas aja.

Baik Pak Ketua Doktor Adies, Pimpinan, Bapak Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati,

Pak Jaksa Agung dan seluruh jajarannya yang saya hormati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama paparan yang disampaikan Pak Jaksa Agung singkat, padat, dan terukur, dalam kaitan menyangkut masalah RKA-K/L 2023. Tadi disampaikan Anggaran Kejaksaan untuk Pagu indikatif 9,6 T, turun dari tahun 2022, dan mengusulkan tambahan 14,2 triliun. Saya kira ini sangat realistis bagi kita ya dari Fraksi PAN ngelihat bahwa, kinerja yang ditunjukkan jajaran Kejaksaan, akhir-akhir ini memang mendapatkan satu respons yang baik bagi masyarakat,

khususnya dalam kaitan masalah pemberantasan korupsi. Apa yang disampaikan Pak Supriansa tadi, itu sangat mengandung kebenaran, dan ada beberapa hal Pak Jaksa Agung yang saya ingin konfirmasi ya, dalam kaitan menyangkut masalah penyelamatan keuangan negara. Apakah yang diselamatkan itu, itu real adanya, ataukah dalam kaitan menyangkut masalah penyelamatan perekonomian. Karena kita harus bedakan antara penyelamatan keuangan dan penyelamatan perekonomian. Kalau beberapa kali Pak Jaksa Agung melakukan jumpa pers ya, memperlihatkan barang bukti sekian ya, penyelamatan-penyelamatan seperti itu, apakah anggaran penyelamatan keuangan negara ini masuk ke kas negara, ataukah ini bisa dapat, saya minta penjelasannya dalam kaitan menyangkut masalah, terkait dengan persoalan ini. Karena dari, dari Laporan BPK tahun 2022, dijelaskan bahwa penyelesaian atas barang bukti berstatus inkraht, berupa uang titipan perkara belum tuntas, ada di sini ada laporan BPK. Kenapa Pak Trimedya ?

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Trimed interupsi ya.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Interupsi Pak Trimedia.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Kenapa Pak Trimed ?

KETUA RAPAT:

Silahkan Pak.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Ini, atau mau capres?

KETUA RAPAT:

Ada Pak Trimed, ada inturpsi, lanjut Pak.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Bisa lanjut Pak Trimedya, urusan, capres, Ganjar dan Bapak, urusan belakangan.

Nah terkait laporan BPK ini Pak Jaksa agung ya, di sini jelaskan bahwa ada 131,65 miliar dan 113.303 US Dollar, yang sampai saat ini dinyatakan belum tuntas, dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan, dari uang titipan

atau titipan uang perkara yang belum jelas. Ini laporan BPK, mohon penjelasan terkait masalah ini, karena ini berkaitan dengan penanganan perkara, yang sudah mempunyai kekuatan hukum.

Ya seharusnya ada Jampidsus sebenarnya untuk menjelaskan ini ya, tapi beliau lagi tidak ada saya lihat, barang kali sibuk karena ada kegiatan di luar, enggak jelas. Itu terkait dengan laporan BPK Pak Jaksa Agung.

Yang kedua, bahwa melihat anggaran yang dipaparkan Pak Jaksa Agung tadi, memang betul Pak dari anggaran pagu indikatif 2023 ini, 9,1 triliun itu memang teralokasi kepada program dukungan manajemen, 521 miliar dalam konteks program penegakan dan pelayan hukum, memang terasa kecil Pak Jaksa Agung, dan tentunya kita berharap bahwa, program penegakan dan pelayanan hukum ini, anggarannya memang lebih ditingkatkan, dari usulan, tambahan 14,2 triliun, ketika misalnya ini disetujui. Ketika misalnya anggaran usulan tambahan 14 koma itu lebih dititikberatkan, jadi prioritas Pak Jaksa Agung, dijadikan prioritas dalam konteks penegakan dan pelayanan hukum, anggaran usulan tambahan 14,2 T ini, ketika ini mendapatkan persetujuan.

Pada prinsipnya Fraksi PAN memberikan persetujuan pagu indikatif 9,6 dan juga memberikan persetujuan untuk diperjuangkan lebih lanjut, usulan tambahan 14,2 triliun. Terima kasih Pak Doktor Adies.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Doktor Sarifuddin Sudding baik, ya sebentar lagi Kang Yusuf. Selanjutnya P3, P3 enggak ada, oke baik Pak Jaksa Agung silakan dijawab dulu ini yang pertanyaan kawan-kawan dari Komisi III.

Anggota Komisi III:

Izin Ketua, untuk ya Anggota tidak dikasih kesempatan ?

KETUA RAPAT:

Setelah ini Pak.

Anggota Komisi III:

Oh baik.

KETUA RAPAT:

Setelah dijawab Pak, Silakan Pak, dijawab dulu.

Anggota Komisi III:

Pak Ketua, ijin Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Yak.

Anggota Komisi III:

Bagusnya biar efektif digabung aja, kan ada yang sama gitu.

KETUA RAPAT:

Nanti aja, dijawab dulu Pak JA.

JAKSA AGUNG RI:

Terima kasih, atas persetujuan-persetujuan dari semua Komisi, ya semua Fraksi, terima kasih untuk persetujuan dan dukungannya. Ada beberapa hal yang ada ditanyakan, yang pertama tadi dari Pak Ichsan dan ini hampir sama dengan ditanyakan oleh Pak Santoso, jadi penambahan anggaran tersebut sangat kita butuhkan Bapak, dalam rangka pembangunan Satuan Kerja di daerah, karena banyak ke Satuan Kerja di daerah, mulai tahun 2018 itu tidak ada anggaran lagi, sehingga kantor-kantor kami dengan Kejaksaan dan yang baru, itu masih nyewa, bahkan biasanya kami diberi dukungan oleh Pemda setempat, yang kadang-kadang kami risi untuk itu, dan untuk itu kami memohon bantuannya untuk dapat disetujui, karena memang kami sangat membutuhkan sarana dan prasarana di daerah ini, dan sejak tahun 2018 tidak ada lagi anggaran.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Interupsi pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Ya pada rapat-rapat sebelumnya Pak Jaksa Agung ya, kita sangat berharap bahwa sedapat mungkin sarana dan prasarana di yang ada di daerah itu, itu tidak mendapat, katakanlah bantuan dalam bentuk apa pun dari Pemerintah Daerah, karena itu yang membuat aparat penegak hukum kita itu tersandera, sedapat mungkin ini diminimalisir Pak Jaksa, atau paling tidak ditiadakanlah, jadi murni anggaran itu dari pihak alokasi dari APBN, dari Kejaksaan, karena banyak yang di daerah seperti ini kejadian. Banyak perkara perkara yang muncul di daerah, yang melibatkan Pemerintah Daerah, apakah itu bupati, wali kota, gubernur, mereka tersandera karena adanya bantuan-bantuan seperti ini, dan itu perkaranya tersendat-sendat, dan itu

berapa kali kita ungkapkan dalam forum rapat seperti ini Pak Jaksa Agung, jangan sampai terulang kembali, baik terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Sudding, Silakan Pak.

JAKSA AGUNG RI:

Yak mohon izin justru itu, kami memohon dukungannya, ini kan ada anggaran yang difokuskan pada dukungan manajemen, itu-itu dalam antara lain ada pembentukan pembangunan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan baru, gitu Pak.

Kemudian, kemudian dari Pak Jacki, tadi persetujuannya sudah, kemudian PKB setuju, kemudian dari Demokrat tadi udah kami sekaligus jawabkan. Kemudian untuk Pak Habib, ini Pak Habib dan dari Pak Sudding sama ini, dari PNPB yang yang kami terima itu adalah, yang kami dapatkan adalah dari barang rampasan, kemudian uang-uang pengganti, yang dapatkan selamatkan. Refokusnya adalah bahwa uang itu adalah kami real adanya. Jadi kami rampas, kami lelang dan itu menjadi untuk negara, kemudian itu dan disetor ke kas negara, bukan dari, kecuali mungkin untuk kasus-kasus tertentu yang memang di mana sumber dana yang dilakukan korupsinya adalah misalnya di daerah, kami akan kembalikan ke kas daerah, atau mungkin di BUMN-BUMN yang jelas itu adalah anggarannya tersendiri gitu.

KETUA RAPAT:

ya kenapa Pak?

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR AL-HABSY):

Boleh tahu Pak, PNPB itu ketika Bapak dapat, memberikan ke negara itu di akhir tahun, atau bagaimana Pak ?

JAKSA AGUNG RI:

Di akhir tahun perhitungannya, PDP dengan Mentri Keuangan.

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR AL-HABSY):

Bukan per kejadian ?

JAKSA AGUNG RI:

Bukan-bukan, bukan, akhir tahun, akhir tahun. Tapi kan kami udah dapat bisa menghitungnya.

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR AL-HABSY):

Ya ya makasih.

JAKSA AGUNG RI:

Demikian Bapak, terima kasih untuk persetujuannya dan kami siap untuk melaksanakan tugas-tugas ini.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak JA, di sebelah kiri masih ada Pak Benny, Pak Johan Budi, sebelah kanan masih ada ?

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Makasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya oke, berarti tinggal Pak Benny, Pak Johan Budi, terakhir Pak Arteria, terakhir Pak Arteria, Pak Benny dulu, oh jadi Pak Benny terakhir, ya udah kalau gitu Pak Johan Budi dulu.

F-PDI PERJUANGAN (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi III, Anggota Komisi III, Pak Jaksa Agung, Pak Wakil Jaksa Agung dan jajaran, yang juga saya hormati.

Tadi sudah disampaikan paparan yang cukup detail ya, dari Pak Jaksa Agung. Sepanjang, saya perlu apresiasi Pak, ke Pak Jaksa Agung yang sekarang, sepanjang KPK berdiri, belum pernah Jaksa, Kejaksaan Agung itu mendapat dukungan masyarakat melebihi KPK, tahun ini Jaksa Agung mendapat, Kejaksaan Agung mendapat dukungan dari masyarakat lebih tinggi dari KPK, ini perlu diapresiasi Pak, saya tidak basa-basi karena ini memang kerja-kerja yang dilakukan oleh Jaksa Agung yang sekarang ya, menurut saya kelihatan betul ya dari pemberitaan. Sepanjang saya di Komisi III Pak, karena kerja-kerja politik ini kadang-kadang dipindahin juga Pak, saya akan mendukung Jaksa Agung, sekaligus juga mengingatkan Pak Jaksa Agung, terhadap perilaku-perilaku Jaksa, tadi Pak Sudding sudah memberikan *warning* sekaligus juga Informasi, bahwa di daerah masih ada Pak, Pak Jaksa Agung, Kejaksaan yang main mata, main proyek, Kajari yang meres-meres gitu, minta bagian dari proyek. Awalnya mengawasi, kemudian juga ikut terlibat ya, dengan memasang bendera-bendera yang, ini perlu, perlu ditindak tegas Pak Jaksa Agung. Di awal rapat dengar pendapat dulu dengan Pak Jaksa Agung, saya selalu mengingatkan ini, baik kepada Polri,

kepada Kejaksaan, jangan dikasih tempat, jangan dikasih ruang, Jaksa-jaksa yang nakal itu Pak. Jadi jangan cuma dicopot, jangan cuma dimutasi, pidanakan Pak. Prestasi Bapak yang sekarang ini yang kemudian menimbulkan dukungan publik yang luar biasa, ini juga harus diimbangi dengan ketegasan Pak Jaksa Agung, terhadap oknum-oknum Jaksa.

Ketika masyarakat ramai tentang minyak goreng, Jaksa Agung cepat merespons dan ini di publik mendapat dukungan yang luar biasa Pak. Tetapi selain mengapresiasi, saya juga mengingatkan Pak, kalau ada oknum Kejaksaan, siapapun orang itu, kalau dia terkena pidana, jangan dituntut ringan Pak, harusnya lebih berat Pak, apalagi kasusnya mendapat sorotan publik secara luas itu. Jadi saya apresiasi kerja-kerja Jaksa Agung, yang sekarang sangat kelihatan ramai di publik ya, melalui pemberitaan, saya juga sekaligus mengingatkan penanganan perkara-perkara korupsi itu, jangan hanya ramai di awal Pak, di tengah tidak ramai, di akhir sepi gitu. Dan Kejaksaan ini kan ada Satgas BLBI, menurut saya itu perlu juga dilaporkan ke Komisi III ya, karena ini kerja-kerja keras dari Kejaksaan yang akan menarik kembali kerugian negara yang luar biasa, waktu jaman BLBI, ini perlu kita apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Jaksa Agung yang sekarang ya. Kalau dari apa, dari profil *body*, badannya ini Pak Jaksa ini tegas ini saya lihat, enggak main-main ya, nah ini kan didenger juga oleh Jam dan juga Kajati mungkin ya, jangan main main lagilah di daerah.

Saya kira itu Pak Ketua, saya Johan Budi SP, Nomor Anggota A-219, menyetujui usulan anggaran yang disampaikan oleh Jaksa Agung, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Merdeka.

KETUA RAPAT:

Ya jadi intinya setuju dengan Fraksi PDIP ya Pak ya. Pak Arteria setuju juga dengan PDIP, baik Silakan

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Ketua beserta Pimpinan yang saya hormati, Anggota Komisi III yang saya hormati,

Pak Jaksa Agung, beserta jajaran yang kami hormati, kami banggakan.

Pertama-tama apresiasi kerja keras, kerja cerdas, kerja hebat di tengah keterbatasan anggaran, kemarin memang kita minim ya, capaian kinerja inovasi-inovasi, gebrakan-gebrakan, walaupun awalnya pasukannya Pak JA demam-demam dan meriang, tapi karena Pak Jaksa Agung tegak, sekokoh batu karang di tengah terjangan ombak samudra, pada akhirnya Pak Jaksa

Agung berhasil menempatkan Kejaksaan untuk mendominasi, giat-giat penegakan hukum yang ada di Republik ini.

Ya mohon maaf kepercayaan Presiden sama Kejaksaan pun juga sangat meningkat, sekarang ini semua urusan dilemparkan ke teman-teman yang ada di Kejaksaan. Kita apresiasi juga, karena memang potretnya dihadirkan jam-jam yang begitu bagus juga, tetapi Pak Jaksa Agung, tadi dikatakan Pak JB, respons publik tinggi, kepercayaan publik sangat meningkat, tapi ironinya adalah ternyata anggarannya dibuat seperti ini. Saya ingin ingatkan Pak Jaksa Agung, ini tugas kita semua Pak, kita punya amanat itu *mandatory* undang-undang, kita punya undang-undang baru Pak, yang memberikan tambahan kewenangan, kepada Kejaksaan. Tapi ini nampaknya Pak Jambin, ini tidak terefleksikan pada saat postur anggaran untuk Kejaksaan Pak, nanti saya akan uraikan satu per satu ini.

Nah dari angka yang segitu, saya ingin juga Pak, Bapak ini sudah begitu elaboratif ya, saya ingin sampaikan dengan 9,632 T ini, ini giat gerakan per program, ini seperti apa, karena pelayanan penegakan hukum itu, cuma 521M. Nah kalau kita telaah lagi Pak, rincian anggaran per bidang, tadi dikatakan sama Pak Rano, itu untuk Intel, itu 67 M, untuk Pidum 239 M, Pidum itu Pak, itu tong sampah, semua barang dari Polisi itu masuk Pak, ya kan. Kemudian Pidus 257, jadi tidak ada *reward*, penghargaan atas kerja-kerja baik Kejaksaan selama ini Pak. Nah kami juga ingin nanti teman-teman yang di Banggar, ada Pak Cucun sama Pak Jambin, kasih tahu Pak, ini adalah mahkotanya Pak, permata dari mahkota, yang menunjukkan kerja-kerja hebat, yang menunjukkan keyakinan kita bahwa bernegara di Republik Indonesia ini membawa perbaikan. Kami ingin juga nanti dibuatkan serius, mereka-mereka ini adalah etalasnya Kejaksaan, anggarannya seperti ini, padahal prestasinya luar biasa.

Berikutnya kami juga ingin sampaikan, mengenai dukungan management Pak, tadi teman teman ngomong itu kok besar sekali, kita punya Undang Undang 11/2021 Pak, menempatkan Jaksa harus jadi Adhyaksa, wajib hukumnya enggak boleh ada alasan lagi Pak, dengan undang-undang ini Jaksa ini adalah *superman* dan *wonder woman*, tapi tunjukkan Pak, dari yang mengenai, yang, yang sekian T itu tadi Pak, fungsi Kejaksaan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dengan tambahan kewenangan ini, terefleksikan di sini Pak. Saya kasih contoh Pak, bicara pasal 3, pasal 4, dan pasal 7, bicara Cabang Kejaksaan Negeri, gambarkan ke kita Pak, Cabang Kejaksaan Negeri ongkosnya berapa, kenapa perlunya. Pak Jambin, uang kita harus minta banyak Pak, saya kasih contoh Pak, BNN anggaran 200 miliar, minta tambahan anggaran 1,2 T, Bapak 9, minta tambahan cuma 14 T Pak, padahal ada Undang-undang baru, ini kan justifikasi alasan Bapak untuk nambah anggaran. Pasal 6 SOTK, kaitan sama anggaran, 8a Hak Jaksa untuk meminta perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri jiwa dan harta benda, mana direfleksikan di sini Pak. Begitu juga pengadaan senjata api, Lembaga Pendidikan Khusus Jaksa di pasal 9a, kemudian juga masalah penelusuran dan perampasan aset di 30a, 30c, statistik kriminal, kesehatan justisial. Inikan tambahan-tambahan kewenangan Pak.

Nah ini artinya apa halal bagi Kejaksaan Agung untuk nambah lebih dari 14 T Pak, halal Pak. Kami ingin sampaikan ya Pak Jaksa, Pak Jaksa, Pak Kejaksaan Agung beserta jajaran, saya apresiasi Pak Jambin, Pak Jambin bagus sekali, ini mungkin di antara mitra kita yang jujur, dari awal pagu, kemudian dibedah lagi, sampai terlalu rinci ini hanya ada di paparan Kejaksaan. Nanti mudah-mudahan teman-teman Komisi III ini bisa jadikan ini sebagai contoh untuk paparan RKA-K/L setiap kementerian lembaga yang menjadi mitra kita. *Role model* Pak, pada prinsipnya saya, karena kan ada Pak Ketua kami Pak, Pimpinan Komisi, kita ini memahami, setuju dan pastinya akan memperjuangkan usulan tambahan anggaran untuk Kejaksaan, berapa pun itu Pak, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan Pak BKH.

F-P DEMOKRAT (DR.BENNY KABUR HARMAN, S.H., M.H.):

Baik, Pak Ketua, Ketua Komisi III, Pimpinan, Bapak Ibu Anggota. Yang saya hormati, Pak Jaksa Agung, Pak Wakil Jaksa Agung, Jambin, Pejabat Utama di lingkungan Kejaksaan.

Sikap fraksi tadi sudah disampaikan oleh Pak Santoso, intinya adalah jangankan tambah 14, tiga kali lipatpun kami mendukung sepenuhnya. Jadi bukan soal tambahannya berapa banyak, tetapi tambahan itu digunakan untuk apa saja, dan bagaimana hasil, bagaimana kinerja tahun anggaran sebelumnya. Kalau saya amati kerja Kejaksaan Agung pada saat ini, mohon maaf Pak Jaksa Agung, saya empat periode di DPR ini, dan terus menerus ada di Komisi ini, oleh sebab itu tidak bermaksud untuk memperlihatkan kesombongan, saya ingin mengatakan bahwa, saya tahu persis kemajuan, prestasi demi prestasi yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan ini pada setiap periode politik di parlemen ini.

Saya ingat betul di masa awal reformasi, bahkan mulai 2004, ketika yang terhormat Trimedya Panjaitan, jadi Ketua Komisi III, kondisi ini begitu dinamis, bahkan pada saat itu boleh dibilang tidak ada Jaksa Agung yang bisa bertahan sampai 5 tahun, selalu gonta ganti, dan itu berkaitan dengan dinamika yang ada di parlemen. Cerita ini ingin saya sampaikan, untuk mengatakan bahwa harus diakui ada kemajuan, ada prestasi yang kita melihatnya dengan jelas, dari periode ke periode, terutama pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi periode yang kedua. Kami melihat kinerja Kejaksaan Agung, Jaksa Agung yang saat ini luar biasa, mohon maaf saya tidak biasa memuji dan menyatakan pujian terhadap pejabat tinggi di bidang penegakan hukum. Perlu saya sampaikan untuk Jaksa Agung yang sekarang ini, menurut saya luar biasa, dan ini dikonfirmasi oleh hasil survei tentang,

pendapat masyarakat, berkaitan dengan kinerja kredibilitas institusi penegak hukum, dan saya melihat Jaksa Agung saat ini luar biasa responsnya. Semula saya pikir ini rekayasa, tapi nampaknya tidak. Nah oleh sebab itu, saya menyampaikan pujian luar biasa ini, apalagi penanganan kasus-kasus korupsi selama ini, kayaknya sudah berpindah, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Anggota Komisi III, Saudara Johan Budi, mantan Pimpinan KPK, beliau sendiri mengakui, bahwa kinerja Kejaksaan Agung sekarang itu luar biasa, khusus di bidang penindakan kasus-kasus korupsi. Tetapi meskipun demikian, tentu mata publik tetap melihat, sejauhmana komitmen Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ditangani, artinya secara adil, tidak diskriminatif, *equal*, dan juga profesional, sehingga tidak ada kesan tebang pilih, tidak ada kesan ada yang disingkirkan, ada yang diakomodir dan ada yang tidak ditangani. Kami terus terang apresiasi untuk kasus yang terakhir kemarin, kasus minyak goreng, di mana Kejaksaan Agung memiliki keberanian, untuk menetapkan tersangka dan menahan Saudara Lin Che Wei ya dan semua orang tahu siapa Lin Che Wei, saya salut. Nah semula saya ragu, saya ragu Pak, KPK saat ini berperan, luar biasa, atas perhatian itu saya menyampaikan pujian yang setinggi-tingginya, teruskan Pak, lanjutkan, kami dukung sepenuhnya.

Yang kedua, kami ingin sekali, sebab tahun-tahun ke depan ini adalah tahun politik Pak Ketua, Pimpinan, Bapak Jaksa Agung, ya mohon maaf sekali, mungkin tidak baik saya ungkapkan, tapi saya ungkapkan. Sebaiknya institusi Kejaksaan Agung ini di terutama di daerah pada pagar satu, jangan ikut-ikutanlah cari-cari politik, jangan, jangan jadi alat politiklah, kalau bisa netral saja, nonton saja, biar kami yang politik ini berkelahi, bila perlu baku pukul, Bapak nonton saja, mungkin nangkap maksudnya Bapak. Oleh sebab itu Pak, kalau saya tidak salah tahun lalu, pernah saya usulkan, apa boleh di desa-desa sekarang ini kan ada dana desa, di mana banyak sekali kepala desa yang menghadapi masalah hukum, bukan karena korupsi, tapi kadang kala kelengahan, tidak tahu administrasi dan sebagainya, tidak tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah oleh sebab itu saya usulkan, apa boleh dana ini juga dialokasikan untuk Program Jaksa Masuk Desa, tapi khususnya untuk memberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan masalah begitu, supaya mereka tahu mana yang secara hukum boleh, mana yang tidak. Nah ini tentu kami sangat senang apabila Pak Jaksa Agung, ya bisa ikut membantu memikirkan itu juga, ide saya ini, pada saat itu macam-macam, mungkin maksudnya baik, tapi kadang kala ya itu tadi, hal-hal seperti ini pasti menjadi masalah kita.

Kemudian yang ketiga, saya juga dapat cerita, juga laporan mengenai dan ini sudah dikonfirmasi oleh temuan-temuan yang disampaikan oleh BPK, terutama berkaitan dengan uang-uang titipan, ya mohon maaf tidak bermaksud untuk apa, menyampaikan koreksi atau mengatakan ini tidak bagus, tetapi saya ingin sekali kalau bisa uang-uang titipan, uang titipan itu ya kembalikanlah kepada yang berhak, jangan lama-lama, ya cerita-ceritanya tak bagus, tapi kalau ini di apa dijalankan dengan baik tentu sangat bagus ya, ini ada titipan apa hasil BPK juga, supaya uang-uang semacam itu di bedah.

Kemudian yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Pak Sudding juga, banyak juga Pak yang apa barang-barang sitaan, dulu istilahnya kita itu Rubasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), Rubasan tuh ya di Kepolisian dan Kejaksaan. Dulu waktu, mohon maaf kami Pimpinan Komisi III, kami pernah melakukan *check on the spot* itu Pak, karena Pak Rahman nggak ada, udah, ya bukan maksud kita untuk jelek-jelek kepada, mungkin hal seperti ini, perlu menjadi perhatian Pak Jaksa Agung.

Selanjutnya soal ini tadi, apa yang kami sampaikan Pak Ketua, jangankan 14 triliun, dua kali lipat pun kalau memang kalau kami punya kuasa.

KETUA RAPAT:

Tiga tadi, tiga.

F-P DEMOKRAT (DR.BENNY KABUR HARMAN, S.H., M.H.):

Ya dua atau tiga kali, tiga kalipun, kalau kami punya kuasa, aku teken danaku, ya itu kalau punya kuasa, tapi Pak Arteria Dahlan tadi, kau jangan banyak ngomong, kau kan partai kecil, lalu aku bilang ya matahari tidak selamanya terbit, dia pasti tenggelam.

KETUA RAPAT:

Yak.

F-P DEMOKRAT (DR.BENNY KABUR HARMAN, S.H., M.H.):

Mohon maaf Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-P DEMOKRAT (DR.BENNY KABUR HARMAN, S.H., M.H.):

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik makasih Pak Benny. Silakan Pak Jaksa Agung, waktu kita tinggal 10 menit.

JAKSA AGUNG RI:

Ijin Pak Johan. Benar sekali Pak, apa yang Bapak sampaikan di daerah masih ada. Tapi itu selalu menjadi perhatian, dan kami selalu menurunkan, kami ada Satgas 53, selalu kami katakan, memang sudah beberapa terbukti, tapi ada juga yang tidak terbukti, hanya perlawanan dari para koruptor, tapi ini sudah dibicarakan, dan insya Allah kami selalu tindak

lanjuti kalau ada informasi. Kemudian untuk Bireuen, Bireuen itu kami pecat Kajarinya, juga Bireuen dan kasuspidum kami juga tindak lanjut. Tapi mohon juga, kami ini terbatas untuk pengawasan, karena juga mohon juga bantuan dari Bapak-bapak di Komisi III, kalau ada hal yang kurang terhadap anak buah kami, mohon informasi.

Kemudian untuk hangat di awal dan di akhir, insya Allah Pak, dan kami mohon juga diawasi, jujur saja, kami juga lebih banyak yang ngawasi, bagi kami ikut senang. Karena kami juga akan ikut mengawasi, karena jadwal kami yang terbatas.

Kemudian untuk Pak Arteria Dahlan, terimakasih.

KETUA RAPAT:

Pak Arteria nggak ada Pak.

JAKSA AGUNG RI:

Baik.

KETUA RAPAT:

Ini kan perorangan, jadi dilewati saja.

JAKSA AGUNG RI:

Baik. Untuk Pak Benny, Pak Benny terima kasih untuk dukungannya, dan sama sama dengan saya nanti, yang adil itu pasti menjadi pegangan.

Kemudian untuk Jaksa untuk tidak berpolitik, itu juga menjadi komitmen saya, saya selalu sampaikan di daerah bahwa, kami tidak ada di mana-mana, tapi ada di mana-mana, dan saya sampaikan, bahwa setiap ada langkah kami selalu sampaikan, untuk menjaga kondisi, bahkan nanti dalam Pilkada kami mungkin ada aturan-aturan tertentu yang harus ditaati oleh Daerah.

Kemudian masalah dana desa, ini satu pemikiran dengan, dengan saya. Dana desa ini, dana yang dikasih ke Lurah, Desa ya, yang penerimaannya itu Kepala Desa ini sekolahnya apa, kita kita juga maklum, banyak ya hanya SD, tukang, mungkin tukang ojek menjadi Kepala Desa, karena dicintai masyarakat, dia tidak, pasti, tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan secara keuangan negara, pasti itu.

Jadi saya selalu katakan pada teman-teman di daerah tolong, ini perhatikan dulu, karena dia, bukan karena dirinya mau korupsi, tapi dia memang tidak, tidak mengerti apa yang harus dilakukan, dan saya selalu minta teman-teman tolong, Pemerintah Daerah itu diajari dulu, Kepala Desa itu mempertanggungjawabkan keuangan, jangan asal menetapkan tersangka, ini udah kami lakukan, insya Allah nanti mohon dukungannya juga.

Saya rasa itu ya terima kasih untuk dukungan ya semua.

KETUA RAPAT:

Masih ada waktu sembilan menit, Pak Wayan, Pak Dimiyati 3 menit ya masing-masing ya, 3 menit, Pak Wayan dulu Pak.

F-PDI PERJUANGAN (I WAYAN SUDIRTA):

01;057;16

Ya, beberapa yang perlu digarisbawahi seperti kasus Jiwasraya, Asabri, minyak goreng memang benar, hampir mustahil dulu kita berharap seperti itu. Tapi ada tapinya Pak, kalau ingin sempurna benar, sesungguhnya kalau di halaman 2 tentang 6 tujuan yang akan dicapai dalam 5 tahun, perkenankan kami juga garis bawah secara positif, poin satu pak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ini kunci Pak, dan Bapak sudah benar, nara ini di point satu. Problemanya kalau tertatih-tatih soal anggaran, walaupun tadi sudah didukung dengan 14,2 mudah-mudahan ya, andaikata saya berguna karena kebetulan atas perintah Pak Ketua Komisi, saya diikuti di Banggar, saya berusaha berjanji semampu saya. Mudah-mudahan tidak berkurang, tapi andaikata ada pengurangan sekecil apa pun, permohonan saya yang paling sangat adalah janganlah point satu tentang SDM ini berkurang, karena kalau target tambah 14,2 itu tidak maksimal Pak, misal dikabulkan sepuluh, tapi tetap, ini prioritaskan dan persentasenya jangan dikurangi.

Masalah yang kedua Pak, tadi disinggung mengenai satgas antara lain BLBI, kalau Bapak ingin sempurna di bidang ini, Bapak harus dibolehkan kita memberi masukan, karena ini kurang terdengar, padahal setiap pembentukan satgas, ini sering dikaitkan dengan isu-isu pencitraan dan berbau politis gitu. Ada bagusnya Bapak memberikan sejumlah anggaran yang memadai dari poin satu ini, karena satgas ini sesuatu yang istimewa Pak. Lalu perkembangannya kalau boleh kita harapkan, Komisi III mengetahui perkembangan setiap saat satgas ini. Sehingga kalau bagian ini Bapak mencari tambahan, rasanya strategis, karena pada umumnya, kalau tidak salah satgas ini dibentuk ketika ada pernyataan Presiden Pak, antara lain ketika masalah mafia tanah, ini yang udah kedua kalinya saya sampaikan kepada Bapak soal mafia tanah, ini yang kedua kali, Presiden juga udah dua kali mengulangi pernyataan gitu, kalau Bapak mau mengerjakan ini secara baik, akan nantinya.

KETUA RAPAT:

Dipersingkat Pak, mohon maaf, waktunya dipersingkat.

F-PDIP (I WAYAN SUDIRTA):

Juga berbanding lurus, tolong perhatikan gunakan kekuatan kewenangan intel dari Kejaksaan yang sudah ditambah, itu saja. Jadi kita ingin Satgas Mafia Tanah ini bekerja lebih maksimal, juga satgas yang lain masih BLBI, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak. Silakan Pak Dim 3 menit, mohon maaf.

F-PKS (DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH. SH., MH. M.SI):

Siap. Ketua, makasih Pak Ketua.
Pimpinan dan Anggota Komisi III, ijin Pak Sekjen,
Pak Jaksa Agung, Waja, beserta jajaran yang saya hormati.

Saya pertama apresiasi Pak, kinerja Kejaksaan Agung, kepuasan publik luar biasa meningkat, tidak hanya *public*, di DPR pun menilai jajaran penegak hukum di Kejaksaan Agung cukup bagus sekali, dan apresiasi juga PNBP meningkat, malah sudah tembus di atas 100%, apa targetnya terlalu kecil atau bagaimana, ini harus ditingkatkan terus Pak, tapi memang kasihan juga dari PNBP itu hanya berapa persen kembali ke Kejaksaan Agung, itu pun kami ingin mendapatkan penjelasan Pak, kalau di Kepolisian kan banyak pengembalian dari PNBP tersebut.

Terus yang kedua Pak. Ini jujur saja, kami apresiasi juga anggaran Kejaksaan Agung ini baru Pak, menembus di angka 10 triliun Pak, baru ini pertama kali. Jadi ini apresiasi siapa Jaksa Agung nya, sejak 2020 itu sudah meningkat tajam sekali, terus siapa Jambinnya, Karoren-nya ini siapa ini, ini Pak Karoreda luar biasa itu, dan juga yang Karoreda sekarang. Nah saya melihat, anggaran yang pagu indikatif 9,6 ini masih kecil Pak, memang harus terus ditingkatkan, kalau bisa Kejaksaan Agung kan punya *power* Pak, *powernya* luar biasa, malah harusnya dapat index prosen saja Pak, dari APBN, ini baru 0,3%, kalau mau penyelamatan keuangan negara, mau negara ini aman, tenteram, ya penegakan hukumnya harus dikasih anggaran yang layak dan cukup. Jujur saja Pak, masih kasihan yang ada di Kejati, yang ada di Kajari, itu anggaran yang namanya Litdik dan Tut, itu hanya cukup satu sampai dua perkara saja, dari mana mereka untuk meningkatkan itu, maka Komisi III punya *concern*, untuk terus meningkatkan ini Pak. Saya juga aneh, anggaran dua puluh empat koma sekian dikasih hanya 40, 30% saja. Harusnya ini Bapak punya apa daya tekan yang cukup, dan Komisi III juga punya aturan main, formula yang cukup, Kepolisian berapa persen, Kejaksaan berapa persen, KPK berapa persen, minimal Kejaksaan Agung itu 0,5% Pak, masih kecil Pak, penyelamatan kepada negara kalau begitu hebat begitu besar.

Terus juga yang berikutnya adalah berapa AA ini (*automatic adjustment*) Pak, yang kedua ada enggak saya rasa ini enggak dicantumkan oleh Bapak, itu baru yang pertama ini, 500 sekian miliar, yang kedua ada enggak *automatic adjustment* kepada Kejaksaan Agung, berapa nilainya, kalau ini dikurangi lagi, gimana nasib Kejaksaan Agung ini, penegakan hukum bisa lumpuh, mohon penjelasan itu Pak.

KETUA RAPAT:

Waktu Pak, waktu Bang.

F-PKS (DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH. SH., MH. M.SI):

Ya satu lagi ya, ya jawaban dari Menteri Keuangan Pak, dari surat Bapak, apa jawabannya. Bapak membuat surat tanggal 6 Juni kalau tidak salah, nah apa jawaban dari Menteri Keuangan, demikian Ketua, makasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih. Silakan Pak Jaksa Agung, pertanyaan terakhir ini tolong di jawab.

JAKSA AGUNG RI:

Untuk Pak Wayan. Pak Wayan kami dengan berapa pun anggarannya, berapa pun nanti yang diizinkan, kami akan selalu siap, meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian masalah BLBI. BLBI ini satgas yang ada di Kementerian Keuangan, kami hanya sebagai anggota pelaksanaan.

Kemudian untuk Pak Dim, Silakan Pak Jambin untuk, karena yang tahu persis pengelolaannya, Pak Jambin Silakan.

JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN:

Siap Bapak. Terima kasih Bapak, atas ijin Pak Jaksa Agung, Kami sampaikan bahwa untuk pemanfaatan PNPB kami saat ini diberikan ijin untuk mengelola itu 25% dari total capaian kita.

Kemudian juga untuk yang kedua, *automatic adjustment* yang kedua, kami dapat potongan 341 miliar lebih Bapak, terima kasih Bapak.

Demikian Bapak.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, kita telah mendengar penjelasan dan jawaban dari Pak Jaksa Agung atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, selanjutnya kami mohon ditampilkan rancangan kesimpulan rapat.

Silakan Bu Adde Rossi tolong dibaca, ya

F-P GOLKAR (Hj. ADDE ROSSI KHOERUNNISSA, S.Sos., M.Si):

Siap Ketua, ijin membacakan Kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung.

Nomor satu, Komisi III DPR RI menyetujui usulan program Kejaksaan RI sesuai dengan pagu indikatif indikatif tahun anggaran 2023 sebesar Rp.9.632.179.592.000,- (sembilan triliun enam ratus tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

KETUA RAPAT:

Ya, gimana Pak Jaksa Agung poin satu, Pak Jambin. Setuju ya, Pak JA, setuju.

(KETOK PALU 1X)

Selanjutnya Bu Adde poin dua.

F-P GOLKAR (Hj. ADDE ROSSI KHOERUNNISSA, S.Sos., M.Si):

Nomor dua, Komisi III DPR RI menyetujui dan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan Kejaksaan RI sebesar Rp.14.820.165.193.979,- (empat belas triliun delapan ratus dua puluh miliar, seratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.24.452.344.785.797,- (dua puluh empat triliun empat ratus lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

KETUA RAPAT:

Setuju Pak. Baik

(KETOK PALU 1X)

Hadirin yang kami hormati dengan telah selesainya pembicaraan seluruh materi rapat, maka selesailah sudah dalam tepat waktu pukul 12.00, seluruh rangkaian kegiatan rapat kerja pada hari ini dan hasil pembahasan anggaran ini akan kami sampaikan ke Badan Anggaran secara tertulis untuk disinkronisasikan. Apabila tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, rapat diakhiri dan atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi III, kami mohon maaf apabila ada hal hal yang kurang berkenan dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Jaksa Agung beserta jajarannya.

Dengan mengucapkan Alhamdulillahil'alamiin, rapat kami nyatakan diskor sampai dengan pukul empat belas kosong kosong, Raker dengan Ketua Komnas Ham yang akan dipimpin oleh Saudara Desmond J Mahesa

(KETOK PALU 3X)

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.00 WIB)

Jakarta, 9 Juni 2022

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001